Journal of Law & Policy Review
ISSN 2987-3150 (Online - Elektronik)
Publisher: Mahesa Research Center
https://mahesacenter.org/

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertanian di Desa Pusuk 1 Kecamatan Parlilitan

Implementation of Government Policy in the Agricultural Sector in Pusuk 1 Village, Parlilitan District

Englin Sianturi, Nabilah Filza Toiba, Nurika Kholila Pohan & Yemima Simarmata*

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: Februari 2019; Disetujui: Maret 2019; Dipublish: April 2019
*Coresponding Email: englinsianturi312@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, serta mengidentifikasi ketimpangan yang terjadi dalam distribusi bantuan bibit unggul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kebijakan melalui pembentukan Kelompok Tani dan pendistribusian bibit unggul serta sarana pertanian lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara bantuan yang diberikan dan luas lahan yang dimiliki petani, yang memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketimpangan tersebut terjadi akibat lemahnya pendataan, kurangnya transparansi, dan minimnya pengawasan dalam proses distribusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sistem pendataan yang akurat, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertanian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: kebijakan pertanian; ketimpangan distribusi; Desa Pusuk 1

Abstract

This study aims to examine the implementation of government policy in the agricultural sector in Pusuk 1 Village, Parlilitan District, and to identify disparities in the distribution of high-quality seed assistance. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through interviews and observations. The findings reveal that the village government has implemented the policy through the formation of farmer groups and the distribution of superior seeds and other agricultural inputs. However, in practice, discrepancies were found between the aid distributed and the actual land area owned by farmers, leading to social jealousy and diminished public trust. These inequalities stem from weak data collection, lack of transparency, and insufficient oversight. The study recommends the need for accurate data systems, open information access, and active community participation in every policy stage to ensure fair and well-targeted distribution. These findings are expected to contribute to the development of more inclusive and sustainable agricultural policies.
Keywords*: agricultural policy; distribution inequality; Pusuk 1 Village*

How to Cite: Sianturi, E., Toiba, N.F., Pohan, N.K. & Simarmata, Y.. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertanian di Desa Pusuk 1 Kecamatan Parlilitan. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (1): 64-70.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya terpadu yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Anggoro, 2003; Lubis, 2014; Suparmoko, 2020). Dalam hal ini, pemerintah memegang peranan penting sebagai pengarah dan pelaksana kebijakan publik, termasuk dalam sektor pertanian. Indonesia, sebagai negara agraris dan maritim, memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Indriani, 2016; Maulana, 2019). Namun, potensi ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya implementasi kebijakan di tingkat lokal.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan publik. Hogwood & Gunn (2005) mengidentifikasi sepuluh bentuk penggunaan istilah kebijakan, mulai dari program hingga proses. Sementara itu, Anderson Hill & Hupe (n.d.) menekankan bahwa kebijakan merupakan rangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu untuk menangani isu-isu tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks pertanian, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Meski lebih dari separuh penduduk Indonesia bergantung pada sektor ini, sebagian besar petani masih hidup dalam kondisi miskin dan rentan. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya, informasi, dan bantuan pemerintah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pertanian yang adil dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya turut menyoroti permasalahan dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal. Penelitian oleh Ahmar et al. (2016) yang berjudul *"Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Desa Parumpanai"* menemukan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan petani masih bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan. Demikian pula, studi oleh Mulda (2017) dalam *"Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia"* menunjukkan bahwa arah kebijakan yang tidak konsisten serta lemahnya evaluasi menyebabkan efektivitas kebijakan menjadi rendah. Sementara itu, penelitian mengenai Kadar (2015) *"Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia"* turut menekankan pentingnya integrasi kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing nasional.

Ketiga studi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi kebijakan dan implementasinya di lapangan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa masalah ketimpangan dalam penerapan kebijakan pertanian bukan hanya terletak pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Misalnya, kebijakan pembagian bibit unggul oleh pemerintah di Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup mencolok. Ketidakmerataan dalam distribusi bibit, yang seharusnya disesuaikan dengan luas lahan pertanian, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi bukti konkret adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) dalam hal bagaimana implementasi kebijakan pertanian diterapkan di tingkat desa dan dampaknya terhadap penerima kebijakan. Meski kebijakan telah dirancang untuk mendukung sektor pertanian, keberhasilannya sangat bergantung pada mekanisme implementasi di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, siapa yang mendapat manfaat, serta sejauh mana distribusinya memenuhi asas keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian di Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, dengan fokus pada aspek ketimpangan dalam distribusi bantuan bibit unggul. Penelitian ini penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini akan menambah khazanah kajian mengenai kebijakan publik dan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

implementasinya dalam konteks lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan, khususnya di tingkat desa dan daerah, dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Dengan demikian, kebijakan yang dicanangkan benar-benar mampu menyentuh kebutuhan riil masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui pengumpulan data yang bersifat naratif dan kontekstual. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertanian serta ketimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya di Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan.

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong., 2005), penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti berusaha untuk memahami makna dari tindakan sosial berdasarkan perspektif partisipan.

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap relevan, yakni Kepala Desa dan masyarakat Desa Pusuk 1 yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan pembagian bibit unggul. Menurut Sugiyono (2015), wawancara merupakan proses pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menggali makna mendalam mengenai topik yang diteliti. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memungkinkan fleksibilitas dalam mengeksplorasi informasi dari informan.

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi partisipatif untuk memperkuat data yang diperoleh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pertanian di Desa Pusuk 1

Kebijakan pemerintah dalam bidang pertanian merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini (Arifin, 2005; Harniawati et al., 2021; Parmila et al., 2022). Di Indonesia, sektor pertanian memiliki kontribusi penting dalam struktur perekonomian nasional, dan oleh karena itu menjadi fokus utama dalam program pembangunan daerah (Saragih, 2017; Suji et al., 2017). Salah satu bentuk implementasi nyata dari kebijakan pertanian pemerintah adalah program pembagian bibit unggul kepada petani, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat tani. Desa Pusuk 1, Kecamatan Parlilitan, menjadi salah satu desa yang memperoleh intervensi kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pertanian di Desa Pusuk 1 dilakukan melalui pembagian bibit unggul kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani. Kelompok Tani merupakan wadah kolektif yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kebutuhan, dan tujuan antar petani di desa tersebut. Pemerintah desa, sebagai pelaksana kebijakan, memfasilitasi kegiatan kelompok ini dengan memberikan bibit tanaman seperti cabai dan jagung, serta sarana pendukung lainnya berupa pupuk dan obat-obatan pertanian. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat tani agar dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka secara berkelanjutan.

Sebelum pelaksanaan distribusi bibit, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap jumlah petani dan luas lahan pertanian yang mereka miliki. Pendataan ini

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

bertujuan untuk menghitung estimasi kebutuhan bantuan secara proporsional, agar distribusi dapat dilakukan secara adil dan merata. Langkah ini mencerminkan adanya upaya sistematis dari pemerintah desa dalam mengelola kebijakan secara tepat sasaran.

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong praktik pertanian yang lebih modern dan efisien. Pengenalan bibit unggul merupakan bagian dari strategi peningkatan produktivitas pertanian yang selama ini diharapkan mampu menggantikan praktik tradisional yang kurang efisien. Pemerintah, dalam hal ini, bertindak sebagai fasilitator dan katalisator perubahan dengan memberikan dukungan input pertanian yang berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan program tidak hanya berhenti pada tahap distribusi, tetapi juga mencakup pembinaan teknis kepada petani. Pembinaan ini melibatkan penyuluh pertanian dan perangkat desa yang bertugas memberikan pendampingan terkait cara budidaya tanaman, penggunaan pupuk, pengendalian hama, serta teknik panen yang optimal. Proses ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan di tingkat desa sering kali menghadapi tantangan administratif maupun teknis. Salah satunya adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa dalam melakukan manajemen program secara efektif. Di beberapa kasus, pendataan luas lahan tidak dilakukan dengan akurasi tinggi, sehingga memengaruhi perhitungan kuota bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing petani. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam tahap distribusi dan dapat mengurangi efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Selain aspek administratif, faktor sosio-kultural juga memengaruhi proses implementasi kebijakan. Dalam konteks Desa Pusuk 1, adanya kesenjangan antara anggota kelompok tani dan petani di luar kelompok menjadi isu tersendiri. Masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok sering kali merasa kurang diperhatikan dalam distribusi bantuan, meskipun mereka memiliki lahan dan kebutuhan yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan perlu mempertimbangkan dimensi inklusivitas, agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari sudut pandang partisipasi masyarakat, program ini sejatinya membuka ruang bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pertanian. Kelompok Tani menjadi medium dialog antara pemerintah dan warga, di mana aspirasi dan kebutuhan petani dapat disampaikan secara kolektif. Namun, efektivitas partisipasi ini sangat bergantung pada kepemimpinan dan kemampuan koordinasi dari pengurus kelompok, serta transparansi dalam pelaksanaan kebijakan.

Adapun keberhasilan implementasi kebijakan ini ditentukan pula oleh kesiapan infrastruktur pendukung di desa. Ketersediaan akses jalan yang baik, fasilitas penyimpanan hasil panen, dan jaringan pasar menjadi elemen penting yang menentukan sejauh mana hasil pertanian dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Di Desa Pusuk 1, keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala, sehingga produktivitas yang meningkat tidak selalu sejalan dengan peningkatan kesejahteraan karena keterbatasan akses distribusi hasil panen ke pasar.

Di sisi lain, peran Kepala Desa sebagai pemimpin lokal sangat krusial dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan. Kepala Desa berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam kasus Desa Pusuk 1, kepala desa memiliki inisiatif dalam membentuk dan memperkuat peran Kelompok Tani serta mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program bantuan secara optimal.

Ketimpangan dalam Distribusi dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Meskipun implementasi kebijakan pertanian di Desa Pusuk 1 menunjukkan upaya yang progresif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan bibit unggul dan sarana produksi, dalam praktiknya ditemukan sejumlah permasalahan yang mengindikasikan adanya ketimpangan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

dalam distribusi bantuan. Ketimpangan ini muncul dalam berbagai bentuk, baik dalam hal prosedur pelaksanaan, kesesuaian data lahan, hingga keadilan dalam alokasi bantuan. Realitas tersebut menjadi tantangan utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang ditujukan untuk kesejahteraan justru tidak menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial di tengah masyarakat.

Ketimpangan dalam implementasi kebijakan pertanian dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuaian antara jumlah bibit unggul yang diterima petani dengan luas lahan yang mereka miliki. Misalnya, seorang petani dengan lahan seluas 1,5 hektar menerima jumlah bibit yang lebih sedikit dibandingkan dengan petani lain yang memiliki lahan 1 hektar. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi pendataan serta integritas dalam proses distribusi.

Masalah ini diperparah oleh rendahnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan mengenai alokasi bantuan. Beberapa masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai kriteria penerima bantuan, metode pendataan, serta prosedur penyaluran. Hal ini memicu spekulasi dan prasangka negatif terhadap aparat desa, yang dianggap tidak adil atau memihak kelompok tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa mengalami penurunan, yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan di masa depan.

Ketimpangan distribusi ini tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat. Munculnya rasa ketidakadilan menimbulkan kecemburuan sosial antara petani yang menerima bantuan dalam jumlah memadai dan mereka yang merasa dirugikan. Hal ini menciptakan fragmentasi dalam hubungan sosial antar warga dan melemahkan solidaritas komunitas, yang selama ini menjadi modal sosial penting dalam kegiatan pertanian kolektif seperti kerja gotong royong dan pengelolaan lahan bersama.

Dari sudut pandang ekonomi, ketimpangan ini berpotensi memperdalam jurang antara petani yang memiliki akses terhadap bantuan dan mereka yang tidak. Petani yang menerima bantuan dalam jumlah cukup dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan mereka, sementara petani lain yang tidak menerima bantuan secara proporsional mengalami stagnasi atau bahkan kerugian. Ketimpangan ini berisiko memperbesar ketidaksetaraan ekonomi antar petani dalam satu wilayah yang sama, dan berpotensi menciptakan ketimpangan struktural yang lebih sulit diatasi dalam jangka panjang.

Ketidakmerataan distribusi juga menghambat tercapainya tujuan kebijakan itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Ketika distribusi tidak dilakukan secara adil dan proporsional, maka potensi kebijakan untuk mendorong peningkatan produksi secara merata menjadi terhambat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan, bahkan menimbulkan resistensi atau penolakan dari masyarakat terhadap program pemerintah di masa mendatang.

Permasalahan ketimpangan ini juga menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. Ketiadaan sistem pelaporan yang akuntabel dan ruang pengaduan yang jelas membuat masyarakat tidak memiliki saluran yang memadai untuk menyampaikan keluhan mereka. Akibatnya, persoalan yang muncul tidak terselesaikan secara konstruktif, dan justru menumpuk menjadi persoalan sosial yang lebih kompleks.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, perlu ada upaya perbaikan yang sistematis dalam sistem distribusi bantuan kebijakan pertanian. Langkah pertama adalah perbaikan dalam sistem pendataan yang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data aktual. Pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi data dapat meningkatkan akurasi dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap program pemerintah. Selain itu, pemerintah desa perlu menyediakan informasi terbuka mengenai mekanisme distribusi, kriteria penerima bantuan, dan alokasi anggaran agar masyarakat dapat memahami dasar kebijakan yang diterapkan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0

Langkah berikutnya adalah pembentukan sistem pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan elemen masyarakat, seperti tokoh adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh agama. Kehadiran pihak ketiga yang netral dapat membantu menjaga integritas proses distribusi dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menyuarakan aspirasi dan keberatan mereka secara sah dan konstruktif.

Dari sisi kebijakan makro, pemerintah daerah dan pusat perlu memberikan panduan yang lebih rinci mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam implementasi kebijakan, termasuk standar proporsionalitas bantuan berdasarkan luas lahan, produktivitas, dan kebutuhan ekonomi petani. Hal ini penting agar setiap kebijakan dapat diterjemahkan secara konsisten oleh pemerintah desa tanpa adanya interpretasi yang bersifat subjektif atau diskriminatif.

Di samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kebijakan publik sangat diperlukan. Masyarakat perlu memahami bahwa mereka memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan kebijakan melalui partisipasi aktif, pengawasan, dan pelaporan. Edukasi ini juga dapat memperkuat budaya demokratis di tingkat lokal serta meningkatkan literasi masyarakat terhadap kebijakan publik.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pertanian di Desa Pusuk 1 menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya yang cukup sistematis dalam menyalurkan bantuan bibit unggul melalui pembentukan Kelompok Tani dan pendataan lahan. Program ini melibatkan distribusi bibit, pupuk, dan pendampingan teknis guna mendorong produktivitas pertanian. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada akurasi pendataan, kapasitas pelaksana di tingkat desa, serta partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses kebijakan. Meskipun telah menunjukkan arah positif, pelaksanaan kebijakan ini masih memerlukan evaluasi dan penguatan dari segi manajerial dan sosial agar dapat berfungsi secara optimal dan berkeadilan.

Ketimpangan dalam distribusi bantuan pertanian di Desa Pusuk 1 memperlihatkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani, praktik pelaksanaannya tidak sepenuhnya adil dan transparan. Ketidaksesuaian antara jumlah bantuan dan luas lahan, minimnya informasi, serta lemahnya pengawasan memicu kecemburuan sosial dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dampak dari ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merusak hubungan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan sistem distribusi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan mekanisme evaluasi agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat secara merata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmar, A., Mappamiring, M., & Parawangi, A. (2016). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI DESA PARUMPANAI KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, *2*(2), 120–136. https://doi.org/10.26618/KJAP.V2I2.873

Anggoro, K. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VlII. Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional*.

Arifin, B. (2005). *Pembangunan Pertanian: Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi*. Grasindo.

Harniawati, W. K., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2021). Evaluasi Kebijakan Spasial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. *Perspektif*, *10*(1), 149–159. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4149

Hill, M., & Hupe, P. (n.d.). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. Sage Publications.

Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (n.d.). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.

Indriani, M. (2016). Peran tenaga kerja Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Gema Keadilan*, *3*(1), 74–85.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.

Kadar, A. (2015). Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(3), 417–442. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/1413

Lubis, M. (2014). PERANAN BUDAYA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *1*(1), 16–37. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.03.005

Maulana, S. (2019). Sinergitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan usaha kecil untuk mewujudkan pembangunan nasional. *Diakses Pada*, *2*.

Moleong., L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Mulda, R. (2017). Konsep dan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, *1*(2). https://doi.org/10.33373/JTP.V1I2.1061

Parmila, I. P., Suardike, P., & Prabawa, P. S. (2022). Kajian pertanian organik dalam upaya menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di kabupaten buleleng. *Jurnal Pertanian Agros*, *24*(3), 1156–1169.

Saragih, R. (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Effectiveness of State Property Administration Policy at Medan Agricultural Extension College Barang Milik Negara Memiliki pera. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, *7*(1), 77–93.

Sugiyono. (2015). *Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suji, Murgianto, Soekarno, S., Sosial, P., Rampai, B., Setiajiati, F., Hardjanto, H., Hendrayanto, H., Suratiyaningrum, Sahide, M. A. K., Jusuf, Y., Supratman, S., Millang, S., Mahbub, A. S., Bachtiar, B., Sabar, A., Nasri, Nursaputra, M., Ahmad, Muh. F., Yahya, N. H., … Springate-Baginski, O. (2017). Perhutanan Sosial. *Warta Kebijakan*.

Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, *9*(1), 39–50.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0